1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Latar Belakang

    Tingkat perubahan gejolak harga, kelangkaan persediaan stok dan produk serta belum meratanya produksi komoditas hortikultura di daerah Kepulauan sangat dipengaruhi oleh faktor letak geografis meliputi kondisi bentang alam, iklim, sumber daya alam dan pola pemukiman dan mata pencaharian penduduk lokal, sehingga diperlukan serangkaian upaya terpadu, sinergis dan konkret Perangkat Daerah terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

    Mengacu pada Tema Peta Jalan Nasional "Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilisasi Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Baru" yang berfokus pada 4 Kunci Stretegis (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Anambas 2025-2030 yakni program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan serta Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata realibilitas program serta penguatan pendataan sektoral sehingga program-program dan kebijakan-kebijakan daerah dalam penanganan inflasi dapat sejalan dengan tema pemerintah pusat yang sinergis dengan Visi dan 8 Misi "Asta Cita".

    2. Landasan Hukum
    3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 Dan Tahun 2027;
    5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2027 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
    6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
    7. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 513 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
    8. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 512 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027.

    3. Maksud dan Tujuan
    4. Maksud

    Untuk mengawasi perkembangan harga bahan pokok, memastikan program intervensi pasar berjalan tepat sasaran, menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengamati secara berkala langkah-langkah pengendalian harga yang sudah dikerjakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

    1. Tujuan

Menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama bahan pokok penting, tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat;
    - Mengukur efektivitas program yang tercantum dalam Peta Jalan (*Road Map*) TPID seperti operasi pasar murah atau program lainnya dapat menjadi faktor yang dapat menekan harga;
    - Mengatasi hambatan lapangan serta menemukan kendala atau masalah distribusi sejak dini agar pemerintah bisa mengambil tindakan korektif dengan cepat; dan
    - Memperkuat koordinasi dengan cara meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait dalam mengendalikan laju inflasi melalui Rapat Koordinasi Tingkat Daerah (Rakorda) maupun Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dan Daerah (Rakorpusda).
4. Analisis dan Perhitungan Indeks Perkembangan Harga
5. Perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sasaran fluktuasi yang ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, 2026, dan 2027 adalah sebesar **1,5±0,5%**. Dalam praktiknya, Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah Non-IHK, sehingga diperlukan suatu mekanisme perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mencatat pertumbuhan positif/negatif serta menganalisis komoditas penyumbang andil fluktuasi pada waktu dan kondisi tertentu secara berkala.

Perhitungan IPH Kabupaten Kepulauan Anambas atas 17 komoditas pangan bahan pokok strategis (BPPS) Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan beberapa pendekatan perhitungan pertumbuhan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat fluktuasi dalam periode tertentu (periodikal). Pendekatan perhitungan ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan pelaksaan tugas yang lebih optimal. Metodologi perhitungan indeks perkembangan harga yang digunakan yaitu perhitungan secara *month to month (m-t-m), year to date (y-t-d),* dan *year on year (y-o-y).*

Berikut ini merupakan daftar 17 Bahan Pangan Pokok Strategis yang menjadi sasaran pantau pergerakan IPH di Kabupaten Kepulauan Anambas, diantaranya:

Beras Medium	Daging Ayam Broiler
Beras Premium	Telur Ayam Broiler
Gula Pasir	Cabe Merah Keriting
Minyak Kita	Cabe Rawit
Minyak Goreng Curah	Bawang Merah Jawa
Minyak Kemasan Sederhana	Bawang Putih
Tepung	Kedelai
Daging Sapi Murni	Jagung
Daging Sapi Impor (Beku)	

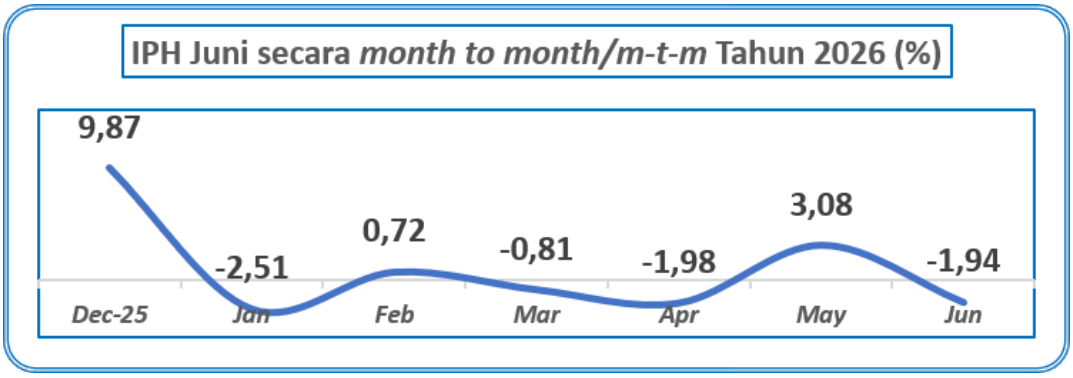
Sumber data: http://inbok.disperindag.kepriprov.go.id/)

1. Hasil Analisis Perhitungan Indeks Perkembangan Harga Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas

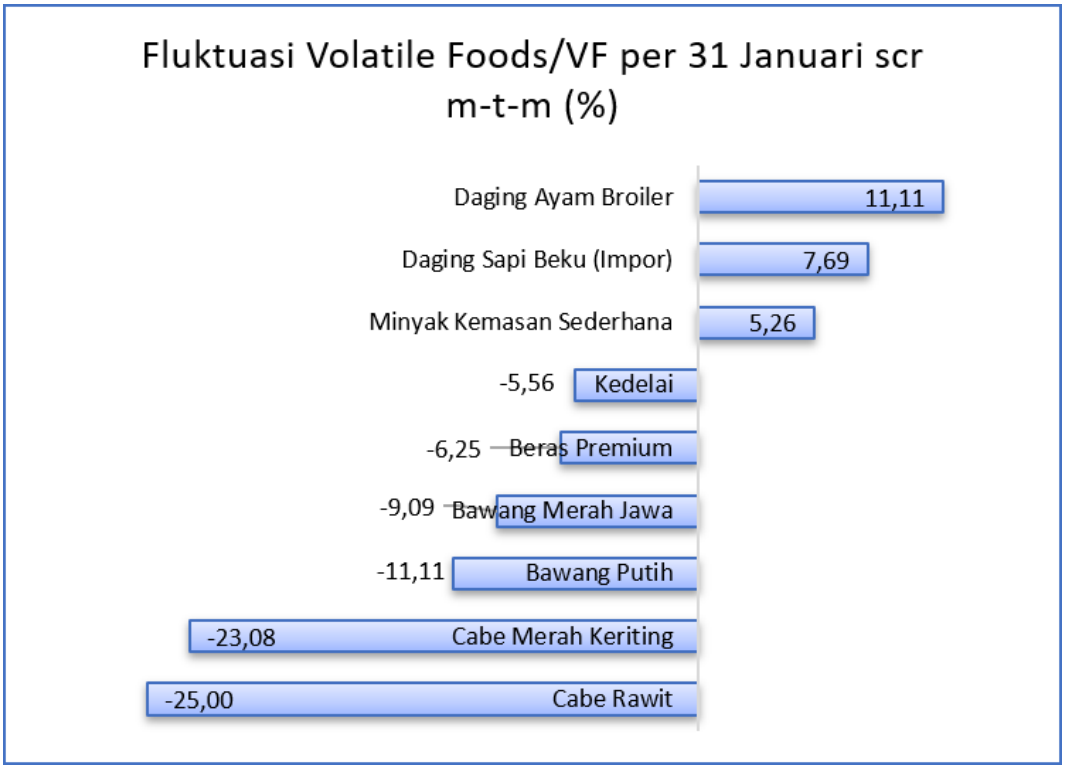
Fluktuasi tertinggi sepanjang semester I Tahun 2026 terjadi pada Mei 2026 yakni sebesar

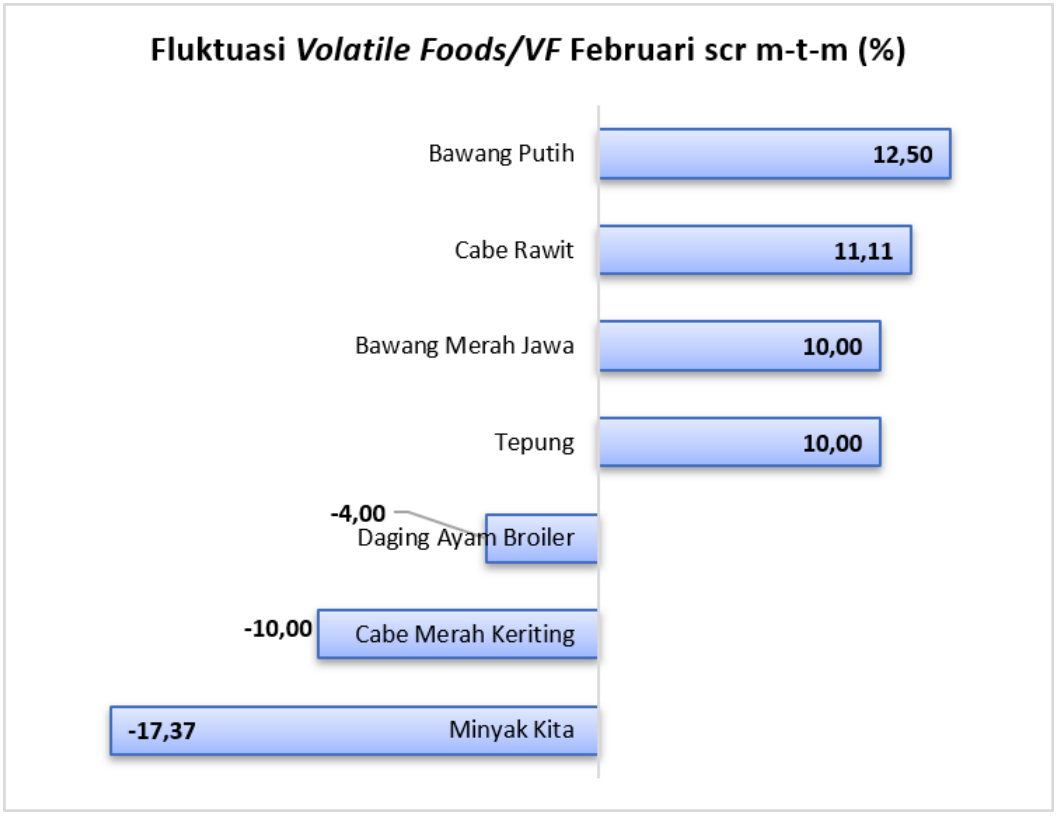
-

3,08%, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas *volatile foods/VF* seperti kenaikan harga Cabe Rawit dari Rp80.000,00 ke Rp85.000,00 (6,25%), kenaikan harga Daging Sapi Murni dari Rp150.000 ke Rp170.000,00 (13,33%) dan kenaikan harga Cabe Merah Keriting dari Rp70.000,00 ke Rp93.000,00 (32,86%). Hal ini merupakan pertumbuhan fluktuasi positif sepanjang Semester I Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Komoditas Cabe Merah Keriting dan Cabe Rawit merupakan komoditas yang paling sering mempengaruhi fluktuasi harga dan memberikan andil fluktuasi Indeks Perkembangan Harga.

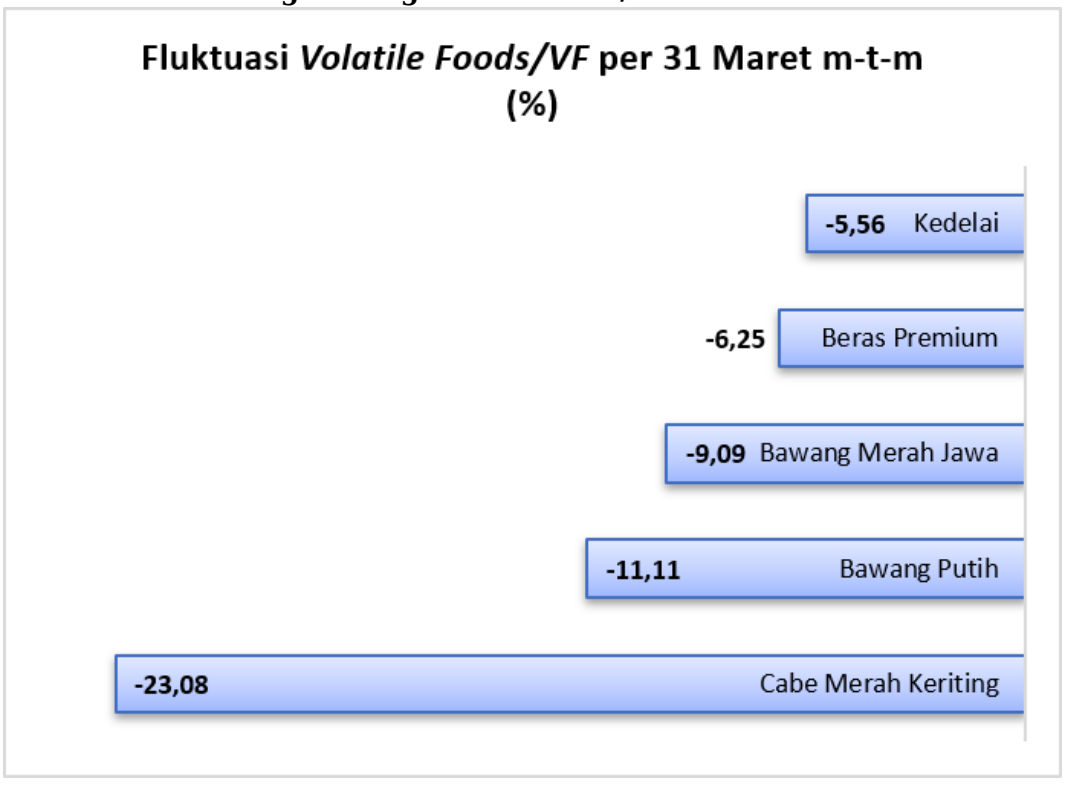


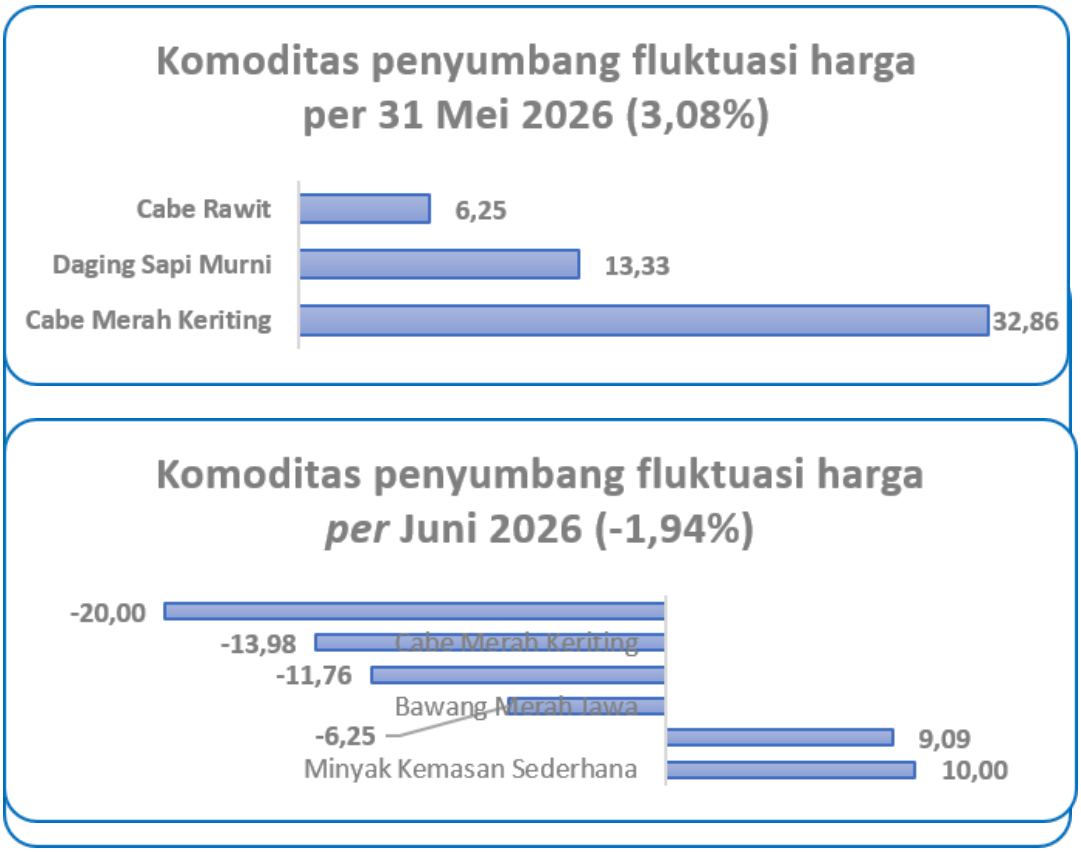
Indeks Perkembangan Harga Triwulan I Tahun 2026


Fluktuasi Volatile Foods/VF per 31 Januari scr m-t-m (%)
Daging Ayam Broiler
11,11
Daging Sapi Beku (Impor)
7,69
Minyak Kemasan Sederhana
5,26
-5,56
Kedelai
-6,25
Beras Premium
-9,09
Bawang Merah Jawa
-11,11
Bawang Putih
-23,08
Cabe Merah Keriting
-25,00
Cabe Rawit


Fluktuasi *Volatile Foods/VF* Februari scr m-t-m (%)
Bawang Putih
12,50
Cabe Rawit
11,11
Bawang Merah Jawa
10,00
Tepung
10,00
-4,00
Daging Ayam Broiler
-10,00
Cabe Merah Keriting
-17,37
Minyak Kita

Indeks Perkembangan Harga Triwulan II / Semester I Tahun 2026





2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari data manifest Syahbandar Tarempa tahun lalu, tercatat Kepulauan Anambas masih melakuan distribusi logistik dari daerah/kota luar daerah (± 90% dari kabupaten/kota terdekat seperti Jakarta, Tanjung Pinang, Batam, dan Natuna) sehingga gejolak harga barang cenderung fluktuatif dan hal ini membuat daerah sangat rentan terhadap guncangan harga global atau pasokan di daerah asal.

Faktor-faktor permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni:

Kelancaran Distribusi

1. Keterbatasan jadwal Tranportasi Kapal Kargo ke Kepulauan Anambas;
2. Lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tarempa bisa mencapai 14 hari Kalender mencakup waktu tunggu bongkar muat antar kapal dan mekanisme cara bongkar muat yang belum efisien;
3. Panjangnya proses distribusi barang ke pengecer memberikan dampak kenaikan harga barang, semakin panjang rantai pasok distribusi, maka semakin besar biaya (cost) yang timbul akan mempengaruhi harga jual barang di tingkat konsumen akhir;
4. Panjangnya rantai pasok (*Supply Chain*) bahan pokok. Jika dihitung dari Pelabuhan Tanjungpinang, Batam dan Jakarta ke Pusat Kota tarempa dan Konsumen Akhir bisa mencapai rentang antara 3-5 kali distribusi rantai pasok.

2. Hambatan Geografis Maritim
3. Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan ± 98% terdiri dari perairan dan hanya ±2% daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga menyebabkan panjangnya rantai pasok dan harga yang variatif;
4. Kondisi musim dan cuaca ekstrim pada waktu tertentu memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.
5. Sosio-Kultural Kepulauan Anambas

Sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan hanya sebagian kecil yang memilih bermata pencaharian sebagai petani sehingga terjadinya ketimpangan antara permintaan dan penawaran khususnya pada kelompok pangan rentan (*volatile foods*).

4. Keterbatasan Data & Metodologi Statistik
5. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas belum bisa menghitung dan merilis angka inflasi IHK resmi (indeks harga konsumen) sendiri. Hal ini disebabkan karena variasi pasar di Anambas belum memenuhi standar minimal syarat 300 item komoditas pantauan;
6. Akurasi Indikator yang Terbatas. TPID Anambas harus mengandalkan perhitungan alternatif seperti Indeks Perkembangan Harga (IPH) makro untuk memetakan fluktuasi harga. Ketiadaan data IHK mandiri mempersulit perumusan kebijakan intervensi pasar yang presisi.
7. Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Ketika pengeluaran pemerintah atau proyek fisik daerah melambat, perputaran uang di masyarakat ikut menurun drastis. Penurunan daya beli ini memicu kondisi di mana harga barang tampak stabil, tetapi perputaran ekonomi di pasar justru melandai atau mengalami kelesuan.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwelling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini

1.

disebabkan karena:

1. Keterbatasan Tenaga kerja Bongkat Muat;
2. Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
3. Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar $1m^3$ (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
4. Belum dimanfaatkanya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan
5. Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan stok, dan mengendalikan inflasi daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Kepulauan Anambas telah tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 512 tentang Peta Jalan (*Road Map*) TPID Tahun 2025-2027. Pada Triwulan I Tahun 2026, TPID Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah serta GPM berikutnya disejalankan dengan agenda bersempena satu tahun Kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari dan 02 Maret 2026 (selama 2 hari) di Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur dan Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas serta telah melaksanakan 1 (satu) kali Gerakan Pangan Murah pada Triwulan II dengan Tema Gerakan Pangan Murah dan Pengobatan Gratis Hewan Kesayangan dalam rangka Bersempena Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-18 Tahun 2026 pada tanggal 23 Juni 2026 di Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga total **Gerakan Pangan Murah yang terlaksana sepanjang semester I tahun 2026 sebanyak 4 (empat) kali** dan sumber pendanaan seluruh GPM berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

DAFTAR PRODUK GPM TRIWULAN II (23 JUNI 2026)

LOKASI	:	HALAMAN KANTOR DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN, KELURAHAN TAREMPA KECAMATAN SIANTAN
TANGGAL	:	23 JUNI 2026
DIBUKA OLEH	:	PLT. KEPALA DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DISELENGARAKAN OLEH	:	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

	NO	KOMODITAS	STOK	TERJUAL	HARGA JUAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
KOMODITAS DAN VOLUME PENJUALAN	1.	Beras SPHP	100 sak	100 sak	55.000	5.500.000
	2.	Minyak Kita	900 liter	900 liter	15.000	13.500.000
	3.	Beras Lokal	100 kg	100 kg	15.000	1.500.000
	4.	Cabe Rawit Nano	5 kg	5 kg	90.000	450.000
	5.	Cabe Rawit	5 ppn	5 ppn	70.000	350.000
	6.	Cabe Merah Keriting	5 kg	5 kg	90.000	450.000
	7.	Mentimun	20 kg	20 kg	10.000	200.000
	8.	Terong Ungu	10 kg	10 kg	10.000	100.000
	9.	Kacang Panjang	10 kg	10 kg	15.000	150.000
	10.	Jagung	50 kg	50 kg	16.000	800.000
	11.	Ubi Kayu	15 kg	15 kg	7.000	105.000
	12.	Kerupuk Cumi	10 kg	10 kg	70.000	700.000
	13.	Kerupuk Ikan	15 kg	15 kg	60.000	900.000
	14.	Ikan Bilis	5 kg	5 kg	60.000	300.000
		TOTAL				**25.015.000**

Nilai total perdagangan Gerakan Pasar Murah Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp119.099.000.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Mendorong jumlah pertumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
    2. Peningkatan Infrastruktur dan Tata Kelola Kepelabuhan Milik Pemda;
    3. Penetapan Tarif Penyimpanan Barang di Area Terbuka (Non-SRG);
    4. Mempercepat Operasional Gudang Logistik; dan
    5. Optimalisasi pemanfaatan kapal tangkapan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berfungsi sebagai penyedia jasa transportasi distribusi bahan pangan pokok dan pangan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Memperkuat analisa terhadap adanya potensi tekanan harga dan stok barang melalui aktivitas pemantauan harga dan stok barang beredar serta memastikan ketersediaan barang dan tidak terjadinya kelangkaan komoditas di Kepulauan Anambas;
    2. Mendorong dan mengawal program-program non-moneter seperti menaikkan hasil produksi komoditas pangan lokal di daerah agar dapat mencukupi kuota kebutuhan lokal dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang beredar secara berkelanjutan serta pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam

operasional BUMDES serta mendorong terbentuknya Mitra RPK melalui BULOG;

3. Mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Teluk Ret melalui kajian yang komprehensif agar operasional Gudang Logistik dapat Terealisasi pada Tahun 2026. TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **"Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret".** Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau.
4. TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inpektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh data dukung dan informasi kegiatan/program yang berkaitan dengan TPID. Seluruh data dan informasi agar dapat dituangkan dalam suatu Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan arahan Kemendagri tentang Tim Penanganan Inflasi Daerah Meningkatkan intensitas Rapat Koordinasi yang seimbang agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat biaya.